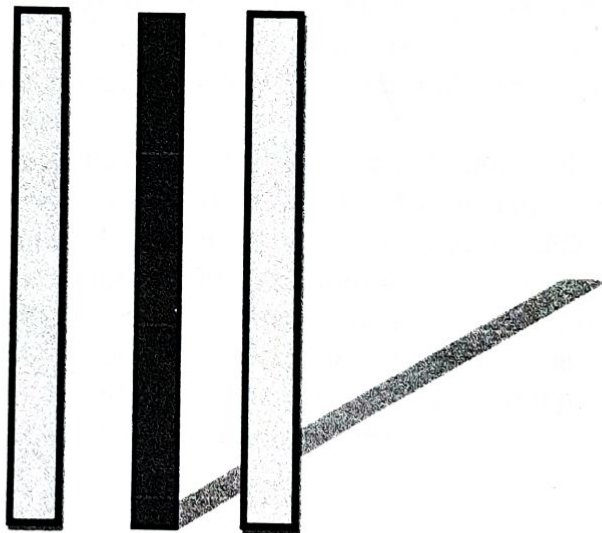
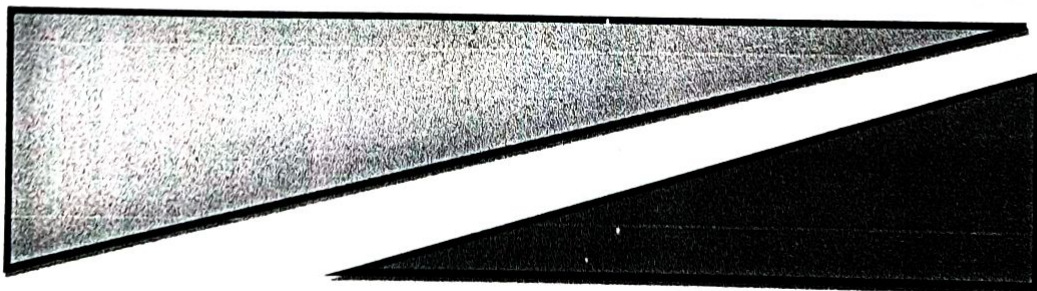


**PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**





LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2025;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52

Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);

10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Tambahan Tunjangan Penghasilan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan Serta Tunjangan Bamuskal dan Insentif Ketua RT/RW Di Kalurahan Girikarto (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 5);

16. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2025 tentang Lembaga Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 6);
19. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2025 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO

dan

LURAH GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp <u>3.385.076.460,00</u>
2. Belanja Kalurahan	Rp <u>3.178.788.920,00</u>
Surplus/Defisit	Rp 206.287.537,00
3. Pembiayaan Kalurahan	

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	73.712.463,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>280.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp</u>	<u>(206.287.537,00)</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- Daftar Pembiayaan Lainnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 'rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto
pada tanggal Desember 2025



Diundangkan di Girikarto
pada tanggal Desember 2025



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.507.910,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.219.738.550,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	84.830.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.385.076.460,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	904.375.164,24	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.594.921.704,24	
5.3.	Belanja Modal	616.642.054,52	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.850.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.178.788.923,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	206.287.537,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	73.712.463,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	73.712.463,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	280.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	275.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(206.287.537,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girikarto, 30 December 2025



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	80.507.910,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.219.738.550,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	84.830.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.385.076.460,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.539.883.275,12</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.134.121.719,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.114.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.114.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	742.106.910,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	742.106.910,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.606.474,24	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.606.474,24	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	93.138.384,76	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.138.384,76	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.547.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.547.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18.340.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.340.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.159.170,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.159.170,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.109.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.109.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	167.706.056,12	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.397.618,00	PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.218,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.227.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.644.500,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.644.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	53.624.938,12	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.230.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	51.394.938,12	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	12.952.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	12.952.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	19.322.000,00	PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.540.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	17.782.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	3.845.000,00	PBH
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.845.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.080.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	7.200.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.2.96		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	2.640.000,00	PBH
1.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	140.000,00	
1.2.96	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	55.438.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.142.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.142.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.110.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.110.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	11.200.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	3.840.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	23.146.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.146.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	162.917.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.450.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.950.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	29.795.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.795.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.520.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.050.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.850.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.900.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.715.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.715.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.900.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	22.160.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.160.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	35.572.500,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.572.500,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.530.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	2.525.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.525.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	29.700.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	3.910.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	4.235.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.235.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.91		Sertifikasi Tanah Milik Desa	8.970.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.970.000,00	
1.5.93		Penyelesaian Tukar Menukar Tanah Desa dengan Tanah Milik Perorangan/Lembaga	6.035.000,00	PBH
1.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.035.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.550.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.180.064.517,60</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	52.822.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.420.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.420.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	10.030.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Misk Desa	8.472.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.472.000,00	
2.1.93		Pendataan Warga Putus Sekolah dan Buta Huruf/Aksara	900.000,00	DDS
2.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	415.008.033,60	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	168.380.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.380.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.515.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.610.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.610.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	9.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	53.485.033,60	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.550.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	24.935.033,60	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.070.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.070.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.150.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	59.388.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.388.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	16.150.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.260.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.260.000,00	
3.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	375.685.062,40	
3.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	66.335.931,00	DLL
3.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.410.000,00	
3.3.10	5.3.	Belanja Modal	64.925.931,00	
3.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.269.131,40	DDS
3.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.095.000,00	
3.3.12	5.3.	Belanja Modal	197.174.131,40	
3.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	105.620.000,00	DDS
3.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.620.000,00	
3.3.17	5.3.	Belanja Modal	95.000.000,00	
3.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3.460.000,00	DDS
3.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.460.000,00	
4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	91.110.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	51.760.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.760.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.350.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.350.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	245.439.421,60	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	61.284.421,60	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.401.879,60	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	59.882.542,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	12.650.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	7.350.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.520.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.485.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah ra ga oleh pemerintah kabupate	165.500.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>295.427.581,88</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.885.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	2.770.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.705.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	2.410.000,00	PBH
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	168.530.761,88	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	39.500.000,00	DDS, PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	9.450.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.450.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.565.000,00	DLL
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.565.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	13.662.761,88	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.662.761,88	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	6.650.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	57.798.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.798.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	21.905.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.955.000,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	62.646.820,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	19.320.000,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.320.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	29.296.820,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.296.820,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.070.000,00	DLL
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.960.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.960.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.365.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.895.000,00	DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.045.000,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.045.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.400.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	11.555.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.555.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	14.855.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.855.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.265.000,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.265.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.120.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.120.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	12.230.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.230.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100.563.548,40	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.820.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.820.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.820.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	46.060.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.400.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	22.655.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.655.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	8.030.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.030.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.805.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.805.000,00	
4.4.97		Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)	3.585.000,00	DDS
4.4.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan anak	3.585.000,00	DDS
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.130.470,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.130.470,00	DDS, PBK
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.130.470,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.525.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.525.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	41.028.078,40	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	36.628.078,40	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	35.568.078,40	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.400.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>62.850.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.250.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.250.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.250.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.178.788.923,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	206.287.537,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	73.712.463,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	280.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(206.287.537,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Girikarto, 30 December 2025



**RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN			
6.	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			73.712.463,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			73.712.463,00
6.1.1.01.	01. SILPA Pendapatan Asli Desa			73.712.463,00
	02. SILPA Alokasi Dana Desa	PAD	1 Ls	1.311.968,00
	03. SILPA Dana Desa (Dropping APBN)	ADD	1 Ls	1.436.009,00
	04. SILPA Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah	DDS	1 Ls	43.061.665,00
	05. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota	PBH	1 Ls	98.920,00
	06. SILPA Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi	PBK	1 Ls	2.120.470,00
	07. SILPA Swadaya Masyarakat	PBP	1 Ls	0,00
	08. SILPA Pendapatan Lain Lain	SWD	1 Ls	0,00
		DLL	1 Ls	25.683.431,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			280.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			275.000.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			275.000.000,00
	01. Penyertaan modal ketahanan pangan ke Bumkal	DDS	1 Tahun	275.000.000,00
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			5.000.000,00
6.2.9.99.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya			5.000.000,00
	01. Dukungan pembiayaan untuk KDMP	DDS	1 Tahun	5.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			206.287.537,00

Disetujui,
LURAH
GIRIKARTO
SUMARDIYONO

Girikarto, 30 December 2025
CARIK
SUPARMAN